BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Gagasan pembentukan Wilayah Bersama menjadi alternatif strategis bagi persoalan-persoalan yang terjadi di perbatasan Keerom-Sandaun. Gagasan pembentukan Wilayah Bersama juga sejalan dengan visi-misi dan arah kebijakan pemerintah RI, bahkan sesuai dengan semangat sistem politik kawasan asia tenggara. Meski demikian, pembentukan Wilayah Bersama di Keerom-Sandaun memiliki sejumlah peluang sekaligus hambatan.

1. Peluang

a. Persoalan Sosiologis Masyarakat Perbatasan Keerom-Sandaun

Ambiguitas perbatasan Keerom-Sandaun yang dilatarbelakangi oleh masalah kepemilikan tanah ulayat dan kekerabatan masing-masing negara yang berbatasan, telah melahirkan sejumlah konsekuensi yang cukup serius. Dengan dibentuknya Wilayah Bersama di perbatasan Keerom-Sandaun, kebebasan masyarakat setempat dalam melakukan mobilitas bagi segala aktifitas baik bersifat ekonomis maupun tradisional sesuai dengan hak dan kebiasaan adat-istiadat, menjadi semakin tertata dan terlindungi. Tata kelola ini menjadi penting karena terkait dengan isu krusial lainnya seperti masalah keamanan dan rawannya tindak kejahatan transnasional.

b. Kesejahteraan

Meski wilayah perbatasan RI-PNG memiliki kekayaan alam berlimpah, namun kesejahteraan masyarakat di sana masih jauh di bawah rata-rata. Gelombang pembangunan nyaris tak menyentuh kawasan perbatasan. Segala sumber daya alam yang

terdapat di perbatasan Keerom-Sandaun pun sama sekali belum dieksplorasi apalagi dieksploitasi terutama bagi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, Pembentukan Wilayah Bersama yang digagas dalam penelitian ini menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, mengingat konsep Wilayah Bersama meniscayakan adanya kerjasama kedua negara dalam membangun aktifitas-aktifitas ekonomis berbasis SDA yang ada.

c. Kejahatan Transnasional

Di sepanjang perbatasan RI-PNG, Kabupaten Keerom menjadi titik paling rawan karena kedua negara memberikan kelonggaran pada masyarakat adat setempat untuk melakukan mobilitas lintas batas. Baik pemerintah RI maupun pemerintah PNG, keduanya tampak ingin melindungi hak-hak adat masyarakatnya yang memiliki tanah ulayat di luar yurisdiksi masing-masing negara. Situasi *interdependence* tersebut sayangnya tidak berada dalam disiplin tata kelola. Alhasil, perbatasan Keerom-Sandaun menjadi gerbang bagi aksi-aksi penyelundupan, pelarian kriminal, dan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya. Dengan demikian, pemerintah RI dan Pemerintah Papua New Guinea sebenanrya memiliki kepentingan geopolitik yang cukup besar di kawasan perbatasan, terutama perbatasan Keerom-PNG. Dan dengan dibentuknya Wilayah Bersama di perbatasan tersebut, pemerintah RI dan pemerintah PNG bisa dengan efektif mengantisipasi berbagai tindak kriminal yang sebelumnya marak terjadi di garis perbatasan.

2. Tantangan

Pada teori perencanaan yang digunakan dalam penelitian ini, ada empat komponen yang menjadi acuan yaitu, *physical planning*, *macro-economic planning*, *social planning*, dan *development planning.* Hambatan pembentukan Wilayah

Bersama secara garis besar terdapat pada komponen *physical planning* dan *macro-economic planning.*

1. *Physical Planning*

Dalam pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan Keerom-PNG, *physical planning* mengarah pada upaya pengaturan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan simpul-simpul aktivitas. Rencana tata ruang wilayah ini meliputi cakupan teritorial Wilayah Bersama yang kemudian akan menjadi garis demarkasi baru sekaligus penentuan kawasan sektor pembangunan.

Luas Wilayah Bersama bisa mendekati dua puluh ribu kilometer persegi dengan medan berupa gunung dan perbukitan yang sebagian besar masih tertutupi hutan. Oleh karena itu, pembentukan Wilayah Bersama yang berorientasi pada pengguna (Pemerintah RI dan PNG, dan masyarakat perbatasan Keerom-Sandaun) akan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Pembangunan simpul-simpul aktifitas fisik dalam Wilayah Bersama akan berhadapan dengan kontur tanah yang ekstrim dan aksesibilitas yang serba minim. Hal tersebut tentu akan menjadi hambatan yang tidak bisa dianggap enteng.

2. *Macro-economic Planning*

Dalam Wilayah Bersama RI-PNG, realisasi dari perencanaan ini berupa pemanfaatan sumber daya alam, produktifitas, perdagangan, dan aksesibilitas ketenagakerjaan. Dengan demikian, hal pokok yang paling dibutuhkan oleh perencanaan ini (selain pembangunan fisik) adalah kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi hambatan yang cukup berarti mengingat sumber daya manusia di perbatasan Keerom-Sandaun masih sangat rendah. Sebagian besar masyarakat di sana bahkan masih menjalani pola

hidup berburu dan meramu. Mereka masih menggantungkan hidupnya pada kekayaan hutan masih—dengan nyaris tidak tersentuh dunia pendidikan.

B. Saran

Dari data dan analisa yang diuraikan dalam penelitian ini, penulis mencoba membuat saran sebagai berikut:

1. Tatanan global dan semangat jaman membuat perubahan paradigma pengelolaan perbatasan menjadi sebuah keniscayaan. Kini, kepentingan keamanan atau hubungan antarnegara harus diletakkan dalam perspektif bahwa wilayah perbatasan juga memiliki potensi-potensi yang mampu memberi kontribusi bagi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan.
2. Persoalan-persoalan yang ada di perbatasan, khususnya di perbatasan Keerom-Sandaun, hendaknya segera mendapat perhatian lebih dari kedua negara yang berbatasan. Sebab masalah tersebut seperti bola salju yang kian lama kian membesar, juga seperti bom waktu yang suatu saat bisa meledak, hingga pada gilirannya akan merugikan kedua negara.
3. Untuk pembentukan Wilayah Bersama di perbatasan Keerom-Sandaun, baik sebagai wacana ataupun rencana, perlu dilakukan riset yang lebih dalam, rinci dan komprehensif.